

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.¹ Inisiatif pembangunan ekonomi melibatkan langkah-langkah seperti industrialisasi, pengembangan sektor pertanian, dan investasi dalam infrastruktur. Selain itu, pembangunan sosial juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Indonesia telah secara aktif melaksanakan program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan inisiatif bantuan untuk keluarga miskin, sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.²

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai hasil yang memadai dengan tidak terlihatnya penurunan jumlah penduduk miskin. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tetap ada, terlihat dari adanya beberapa daerah di sekitar kota-kota besar yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Tantangan kemiskinan juga bervariasi di setiap daerah, sehingga pengidentifikasian faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan tidak dapat menggunakan metode yang seragam di seluruh wilayah.³

Dalam perspektif Islam, memberantas kemiskinan tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip agama ini. Islam, sebagai sistem agama dan hukum yang menyeluruh, memberikan panduan yang terperinci mengenai cara mengatasi

¹ Teja, "Pusat Pengkajian Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no 1 (2020): 88–89, <<https://doi.org/10.1515/9783110915655-023>>.

² Ichwan Muis, "Implementasi Program-Program Perlindungan Sosial", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 17, no.2 (2018): 281–93.

³ Muhammad Adryan Okuputra dan Nasikh Nasikh, "Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan", *Jurnal Inovasi Ekonomi* 18, no 1 (2022): 159–66, <<https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>>.

kemiskinan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.⁴

Kemiskinan memiliki potensi untuk menggoyahkan keyakinan (aqidah), karena pada hakikatnya, saat berada dalam keadaan kekurangan, seseorang dapat tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang baik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan dapat membawa seseorang ke jurang kekafiran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Na'im:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: "Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran." (HR Abu Na'im)

Penting untuk diinterpretasikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak boleh dianggap sepele, karena dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi fokus utama dalam implementasi program pemerintah, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam kondisi miskin.

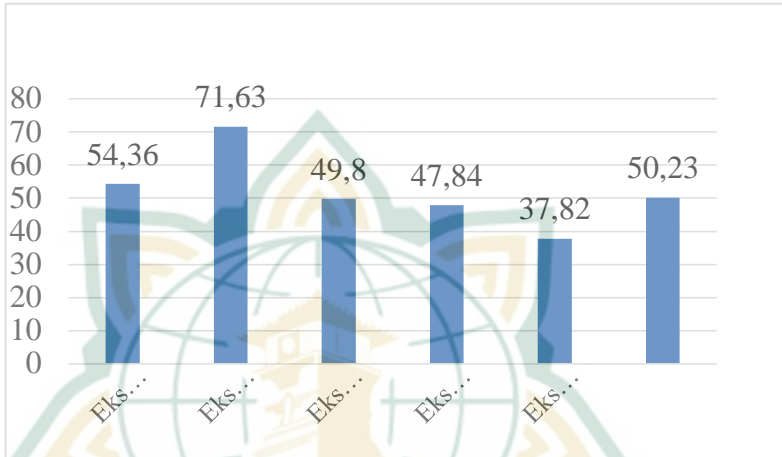
Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kini menjadi sorotan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2022 mencapai 11,25%, sementara presentase penduduk miskin di tingkat nasional sebesar 9,36%. Provinsi ini terbagi menjadi beberapa Eks Karesidenan, termasuk Eks Karesidenan Banyumas, Eks Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati, Eks Kresidenan Pekalongan, Eks Karesidenan Semarang, dan Eks Karesidenan Surakarta.⁵

⁴ Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah* 4, no 1 (2018): 10.

⁵ "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah", (2022).

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin
Eks Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2022 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2022

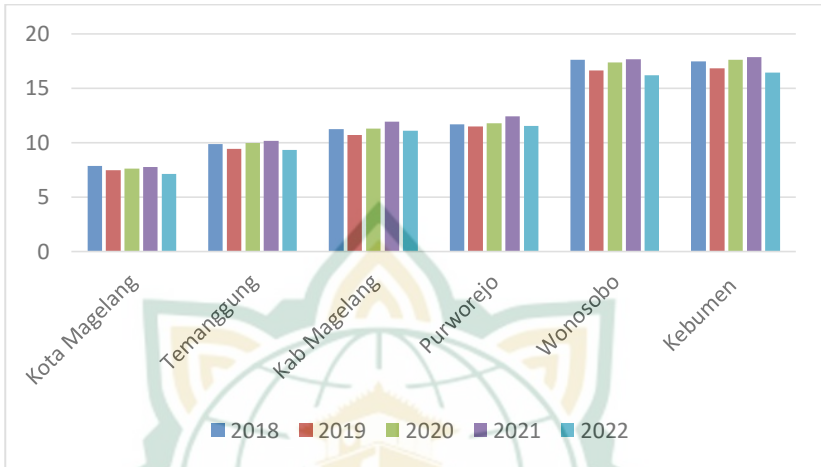


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data grafik tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa peringkat pertama dalam tingkat kemiskinan dipegang oleh Eks Karesidenan Kedu, dengan presentase sebesar 71,63%. Hal ini disebabkan oleh kontribusi beberapa kabupaten yang termasuk dalam wilayah Kedu, yang menyumbangkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Eks Karesidenan Kedu mencakup enam Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang.⁶

⁶ "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah", (2022).

Tabel 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Eks Karesidenan Kedu
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan informasi pada tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa pada periode 2018-2022, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Kebumen pada wilayah Eks Karesidenan Kedu.⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan kesempatan dan peluang kerja di Kabupaten Kebumen menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan, seiring dengan jumlah tenaga kerja yang melebihi peluang pekerjaan yang tersedia. Disisi lain, tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kota Magelang. Hal ini dapat dijelaskan dengan status Kota Magelang sebagai ibu kota Eks Karesidenan Kedu, yang menyebabkan banyaknya peluang usaha, aktivitas perekonomian masyarakat, serta pembangunan fasilitas publik di kota tersebut.

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang menjadi penghambat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus merupakan hal yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.⁸ Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang juga menjadi syarat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah

⁷ "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah", (2022).

⁸ Khodijah Ishak, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Indonesia* 3, no 1 (2019): 245.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor, khususnya pada subsektor yang telah ditentukan. PDRB yang tinggi dalam suatu daerah mencerminkan perkembangan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan.⁹ PDRB mencakup total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Penghitungan PDRB memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan daerah, mengevaluasi hasil pembangunan, serta memberikan informasi yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah.¹⁰

Pada dasarnya, pembangunan daerah disarankan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kemiskinan yang mungkin muncul sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut. Menurut Esmara dalam ilmu ekonomi, terdapat berbagai teori yang membahas strategi penanganan pembangunan ekonomi guna mengatasi keterbelakangan.¹¹ Seiring waktu, para ekonom berpandangan bahwa pendekatan terbaik untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin, sehingga dapat mengungguli tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara ini, pendapatan per kapita diharapkan meningkat, secara otomatis membawa peningkatan kemakmuran bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sering dijadikan indikator untuk mengukur kemajuan sektor pendidikan. Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidakmampuan penduduk daerah untuk memahami, menerapkan, dan mengakses pengetahuan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan dalam hal mobilitas sosial dan peluang pekerjaan.¹²

⁹ Ervin Nora Susanti dan Sartiyah Sartiyah, "Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Dimensi* 8, no 2 (2019), 143–52 <<https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2156>>.

¹⁰ "Badan Pusat Statistik", (2023), <<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>>.

¹¹ Siti Aminah, "Analisis Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi", *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4, no 2 (2019): 119–30, <<https://doi.org/10.22437/ppd.v4i2.3587>>.

¹² Musyarifah, "Mobilitas Sosial Dalam Pendidikan", *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019): 34-35.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam mengejar pekerjaan berbayar tinggi atau mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Tingkat melek huruf yang rendah atau buta huruf dapat menjadi kendala serius dalam mencari pekerjaan dan memahami informasi yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Kondisi buta huruf juga dapat membuat individu menjadi rentan terhadap eksploitasi ekonomi.¹³

Dalam konteks ini, Islam memberikan ajaran tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi individu. Pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai kunci untuk membuka peluang pengentasan kemiskinan jangka panjang, karena memberdayakan individu agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan menjadi mandiri secara ekonomi. Prinsip ini mencerminkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Alaq (96:1) yang menyatakan:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (QS. Al-Alaq, 5:1).¹⁴

Dalam konteks ini, perintah iqra' (bacalah) dalam Islam mengajak manusia untuk aktif mencari ilmu dan pengetahuan dengan cara membaca, belajar, dan merenungkan ayat-ayat Allah yang menciptakan alam semesta. Pesan ini menggambarkan bahwa pendidikan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam dan menjadi pondasi bagi pemahaman terhadap ajaran agama, moralitas, dan perkembangan pribadi. Makna dari ayat tersebut juga mempromosikan konsep ilmu sebagai sarana untuk memerdekakan diri dari kegelapan kebodohan.¹⁵

Dalam budaya Islam, terdapat pepatah yang sering diucapkan, yaitu “Tuntutlah Ilmu Hingga ke Negeri Cina”, yang menekankan pentingnya mengejar pengetahuan dan pendidikan

¹³ UNICEF, "Mengatasi Hambatan Gender Dalam Kewirausahaan Dan Kepemimpinan Bagi Anak Perempuan Muda Di Asia Tenggara", (2020): 1–113.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Alaq Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 35.

¹⁵ Daud, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al Qur'an", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no 1 (2018): 17–20.

dalam Islam sebagai suatu kewajiban yang sangat tinggi. Pepatah ini mencerminkan semangat lapar akan ilmu yang diwajibkan bagi setiap individu Muslim. Semangat untuk terus belajar dan mengejar pengetahuan dianggap sebagai nilai utama dalam budaya Islam, dan pepatah ini mengingatkan bahwa usaha dalam menuntut ilmu harus dilakukan tanpa henti, bahkan hingga ke ujung dunia.¹⁶

Faktor-faktor ini bersatu untuk menciptakan lingkungan di mana kemiskinan menjadi semakin persisten dan sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan sering kali memerlukan program-program pendidikan, literasi dan pelatihan untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang diperlukan guna meningkatkan kondisi ekonomi mereka.¹⁷

Tingkat pendidikan yang tinggi atau rendah dapat memengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu daerah.¹⁸ Pengembangan ekonomi suatu daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator, termasuk tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menjadi salah satu parameter untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah, dan semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin buruk kondisi ekonomi wilayah tersebut. Tingkat pengangguran yang tinggi memiliki potensi menghambat perkembangan jangka panjang suatu wilayah, serta memberikan beban tambahan bagi keluarga dengan risiko meningkatnya tingkat kemiskinan.¹⁹ Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menjadi pemicu peningkatan tingkat

¹⁶ Ainul Latifa, *Digital Repository Universitas Jember* (Jember: Paguyuban Pandhalungan Jember, 2018), 161, <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/AinulLatifah-101810401034.pdf?sequence=1>>.

¹⁷ Aylee, "Mengenal Dan Memahami Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, (2019): 34-35.

¹⁸ Juan Dwi Purnama, Subaheri Subaheri, dan Deris Desmawan, "Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang", *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no 1 (2023): 71-77 <<https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.53>>.

¹⁹ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, "Analisis Keberadaan *Trade off* Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia", *APBN Induk*, (2019): 23-31.

kejahatan, sebagai respons terhadap upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sulit dihadapi.²⁰

PDRB, pendidikan dan pengangguran memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk tingkat kemiskinan suatu daerah.²¹ PDRB mencerminkan tingkat perkembangan perekonomian daerah, sementara pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial.²² Di sisi lain, tingginya pengangguran yang tinggi dapat menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Eks Karesidenan Kedu, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan PDRB. Pendidikan juga dianggap sebagai faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat pengangguran yang berkontribusi pada kemiskinan.²³ Meskipun demikian, tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian yang signifikan karena berpotensi memengaruhi sumber pendapatan masyarakat.²⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah menginvestigasi dampak PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Marito Ritonga dan Tri Wulantika pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (2010-2018)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara pada periode tahun 2010-2028. Sementara itu, jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan

²⁰ Khodijah Ishak, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Indonesia* 3, no 1 (2019): 245.

²¹ Dio dan Syahrullah, "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012", *Skripsi*, (2018): 34-44.

²² Marihot Nasution, "Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya Dengan Belanja Pemerintah: Studi Di Indonesia", *Jurnal Budget* 5, no 2 (2020): 14-22.

²³ Ainil Zaqiah, Mike Triani, dan Isra Yeni, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 5, no 3 (2023): 33, <<https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284>>.

²⁴ Bagus Haryo Kusumo, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 10, no 2 (2022): 1-21.

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Batu Bara dalam kurun waktu yang sama. Secara bersama-sama, kedua variabel independen tersebut dalam penelitian ini memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara pada periode tahun 2010-2018.²⁵

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat” yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syoria Meidona, ditemukan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Namun, tingkat pendidikan memberikan pengaruh negatif pada tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ricky Darmawan dan Rusdiansyah pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin”, ditemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, begitu juga dengan pengangguran. Sementara itu, jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama PDRB, pendidikan, pengangguran, dan jumlah penduduk tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin.²⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewita Adam, Fahrudin Zain Oliling, dan Ivan Rahmat Santoso pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara”, ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah

²⁵ Marito Ritonga dan Tri Wulantika, "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)", *Jurnal Diversita*, 6.1 (2020): 95–102 <<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135>>.

²⁶ Patria, dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan", *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>>.

²⁷ Muhammad Ricky Darmawan dan Rusdiansyah Rusdiansyah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kota Banjarmasin", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2, no 4 (2019): 925, <<https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1229>>.

memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, secara simultan rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara.²⁸

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Suripto dan Lalu Subayil pada tahun 2020, berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I Yogyakarta Periode 2010-2017 menghasilkan temuan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Sementara pengangguran berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta.”²⁹

Pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Tingkat kemiskinan erat kaitanya dengan PDRB, pendidikan, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dalam PDRB yang rendah dapat menciptakan lapangan kerja yang terbatas, meningkatkan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya, meningkatkan risiko kemiskinan. Pendidikan yang kurang memadai juga dapat menghambat mobilitas sosial dan peluang pekerjaan, memperkuat siklus kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam masyarakat, memperburuk kondisi kemiskinan dengan

²⁸ Deswita Adam, Fahrudin Zain Olilingo, dan Ivan Rahmat Santoso, "Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara", *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 8, no 1 (2022): 97–111 <<https://doi.org/10.35906/jep.v8i1.1039>>.

²⁹ Suripto dan Lalu Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no 2 (2020): 127.

mengurangi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan bagi individu.³⁰

Eks Karesidenan Kedu menjadi objek penelitian yang menarik karena wilayah tersebut menduduki peringkat tertinggi dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.³¹ Periode 2018 hingga 2022 menjadi fokus penelitian yang menarik, terutama karena pada tahun ketiga periode tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia maupun secara global. Perubahan signifikan dalam perekonomian, khususnya pada tingkat PDRB, serta perubahan dalam sektor pendidikan dan lapangan kerja akibat pandemi, kemungkinan besar akan memberikan dampak yang beragam terhadap tingkat kemiskinan.³² Faktor yang akan menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini terletak pada lokasi di Eks Karesidenan Kedu pada rentang tahun 2018-2022. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas menunjukkan hasil yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda, maka agar memperkuat hasil sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022?
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022?

³⁰ Ari Mulianta Ginting dan Rasbin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 2, no 1 (2019): 279–312.

³¹ Amalia Yunia Rahmawati, 'BPS Kabupaten Kebumen', (2020): 1–23.

³² Wiwin Priana Priseptian, Laga dan Primandhana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan", *Jurnal Esensi Ekonomi* 1, no 2 (2022): 45–53, <<https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>>.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perekonomian dan pengembangan ilmu pengetahuan, mengetahui peran masing-masing variabel khususnya PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Manfaat khusus ilmu pengetahuan adalah dapat melengkapi studi mengenai tingkat kemiskinan dengan mengeksplorasi secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung atau tidak langsung bagi:

a. Bagi Penulis

Di bidang ekonomi syariah untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh variabel PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penulis dapat menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktik dengan menganalisis dan memecahkan masalah.

b. Bagi Akademisi

Memberikan wadah bagi akademisi untuk mengembangkan penelitiannya dan mencapai hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan.

c. Bagi Pemerintahan

Sebagai bentuk kontribusi untuk lebih memperhatikan permasalahan PDRB, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Berikut sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh peneliti:

1. Bagian awal

Bagian ini mencakup cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik.

2. Bagian isi

Bagian ini meliputi 5 bab, yaitu:

BAB I.

Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Landasan Teori

Membahas landasan teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III.

Metode penelitian

Bab ini akan berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

BAB IV.

Pembahasan

Berisikan terkait gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V.

Penutup

Memuat kesimpulan, saran, penutup.

3. Bagian Akhir

Menyertakan daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, lampiran yang mendukung konten penelitian, dan daftar riwayat hidup.